

Menggali Koneksi Tambang: Muhammadiyah sebagai Intermediary Antara Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat

Muhammad Fitrah

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi:

Email: muhammadfitrah2001@mail.ugm.ac.id

Info Artikel

Masuk: 26 November 2024

Revisi: 24 Desember 2024

Terbit: 31 Januari 2025

Keywords:

Concession,
Intermediary,
Muhammadiyah,
Mining

Kata kunci: Koneksi,
Intermediary,
Muhammadiyah,
Tambang

Abstract

This research aims to analyse the role of Muhammadiyah as an intermediary actor in the preparation of mining concession management, which plays an important role in bridging the various interests between the government, companies, and communities. Using a qualitative research approach and descriptive case study method, this research explores the analysis of official documents as well as media coverage related to mining management. The findings of this study show that Muhammadiyah, although at the preparatory stage, has taken significant steps in performing its intermediary function by considering various important factors, including social justice, environmental sustainability, and inclusiveness in the decision-making process. In addition, an organisational governance model in which Muhammadiyah acts as a lead organisation seems very relevant, but with an emphasis on shared governance elements that allow participation from various related parties. In this context, Muhammadiyah seeks to balance the tensions that exist in natural resource governance in order to achieve sustainable development goals that are equitable and environmentally sound. This research provides important insights into the role of religious institutions in natural resource management in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Muhammadiyah sebagai aktor intermediary dalam persiapan pengelolaan konsesi pertambangan, yang memainkan peran penting dalam menjembatani berbagai kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode studi kasus deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi analisis dokumen resmi serta pemberitaan media terkait pengelolaan tambang. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah, meskipun berada pada tahap persiapan, telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menjalankan fungsi sebagai intermediary dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting, termasuk keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, model tata kelola organisasi di mana Muhammadiyah berperan sebagai lead organization tampak sangat relevan, namun dengan penekanan pada elemen shared governance yang memungkinkan partisipasi dari berbagai pihak terkait. Dalam konteks ini, Muhammadiyah berupaya untuk

menyeimbangkan ketegangan yang ada dalam tata kelola sumber daya alam demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai peran lembaga keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

PENDAHULUAN

Melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), badan amal usaha yang dimiliki oleh setiap organisasi masyarakat keagamaan akan mendapatkan sebuah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau bisa dikenal dengan singkatan IUPK di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK (Listiyani & Nopliardy, 2017; Sapii et al., 2024). Pemberlakuan PP tersebut memunculkan berbagai perdebatan di masyarakat terkait dengan ormas keagamaan yang sejatinya merupakan organisasi masyarakat yang fokus menjalankan perannya dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan untuk beradaptasi dalam konteks sosial ekonomi yang lebih luas, beberapa ormas keagamaan memperoleh peluang baru untuk memperluas pengaruhnya melalui keterlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya, khususnya dalam konteks konsesi tambang, membawa signifikansi yang besar. Ormas keagamaan yang selama ini berperan sebagai pendorong nilai-nilai sosial dan moral, serta menyokong hak untuk berserikat serta bebas beragama, kini menghadapi tantangan untuk menyesuaikan peran mereka dengan tuntutan zaman (Fariduddin & Kusuma, 2024; Priyono & Nilamsari, 2021). Ormas dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan. Namun, muncul perdebatan mengenai konsesi tambang tersebut. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang akhirnya menerima konsesi tambang ini sebelumnya telah melewati berbagai dinamika baik berupa penerimaan, perbedaan pendapat yang berujung kepada penolakan. Di internal Muhammadiyah, terdapat tanggapan yang beragam di kalangan kader dan anggota terkait keputusan untuk menerima konsesi tersebut. Beberapa kader, terutama yang tergabung di dalam organisasi dakwah komunitas Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) menunjukkan penolakan berdasarkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan. Mereka menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai spiritual serta moral yang diusung oleh organisasi. Penolakan ini mencerminkan ketegangan antara prinsip

organisasi dan kebutuhan untuk mengambil langkah strategis dalam konteks pembangunan sosial.

Proses pengambilan keputusan ini tentu memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak jangka pendek dan panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Setelah melalui diskusi mendalam dan evaluasi menyeluruh, Muhammadiyah memilih untuk menerima konsesi tambang. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan peluang untuk mendorong praktik yang lebih berkelanjutan, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat yang terdampak tetap diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, mengungkapkan bahwa organisasi Muhammadiyah siap untuk menerima izin dalam pengelolaan tambang tersebut, dan langkah ini diambil dengan mempertimbangkan tujuan utama yang ingin diwujudkan, yaitu keadilan serta peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas, yang sering kali terabaikan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (Hakim & Sambas, 2024). Dengan pernyataan ini, tampak jelas bahwa Muhammadiyah berupaya tidak hanya untuk mempertahankan kepentingan organisasinya, melainkan juga untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada serta memberikan respons yang proaktif terhadap kebutuhan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai salah satu dari banyaknya organisasi masyarakat keagamaan yang ada di Indonesia, Muhammadiyah memiliki peran strategis sebagai aktor intermediary yang dapat menjembatani kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Melalui keterlibatannya dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konsesi tambang, Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan suara masyarakat tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dengan potensi untuk berperan sebagai mediator, Muhammadiyah harus mengedepankan dialog konstruktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan yang terlibat. Komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal yang terdampak. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, selanjutnya penulis akan melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana Muhammadiyah berperan sebagai aktor intermediary (perantara) dapat menentukan dan mengambil langkah ke depan yang dimana keputusan-keputusan yang akan diambil akan menjadikan kemaslahatan

bersama baik antara pemerintah, perusahaan, dan terkhusus masyarakat yang akan merasakan dampak terhadap proses pertambangan menjadi fokus dan tujuan utama. Hal tersebut sangat penting untuk selalu diperhitungkan agar klaim yang disampaikan oleh Muhammadiyah yaitu akan melakukan proses pengelolaan pertambangan yang 'ramah' dapat benar-benar terealisasikan dan bukan hanya sekedar sebuah angan-angan semata. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengkaji peranan Muhammadiyah sebagai aktor intermediary dalam menghubungkan tiga elemen yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengelola pertambangan yang ramah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis potensi peran Muhammadiyah sebagai perantara (*intermediary*) dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. Meskipun Muhammadiyah saat ini masih dalam tahap persiapan untuk mengelola konsesi pertambangan yang baru diterima, peran *prospective* organisasi ini sebagai perantara perlu dikaji untuk memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di masa mendatang. Analisis ini menggunakan kerangka teori intermediasi Howells, (2006) sebagai dasar dan untuk memperkaya pemahaman dengan mengintegrasikan model-model tata kelola jaringan organisasi dari Provan & Kenis (2008). Howells mendefinisikan intermediasi sebagai proses di mana aktor perantara memfasilitasi interaksi dan negosiasi antar aktor kunci dalam suatu sistem. Dalam konteks pertambangan, aktor-aktor kunci meliputi pemerintah (yang menetapkan regulasi), perusahaan pertambangan (yang mengejar keuntungan), dan masyarakat (yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan). Muhammadiyah dengan basis massa yang luas dan reputasi yang baik akan sangat berpotensi besar menjalankan peran intermediary untuk menghubungkan dan menyeimbangkan kepentingan ketiga aktor ini. Selanjutnya, Provan dan Kenis mengidentifikasi tiga model utama tata kelola jaringan, yaitu:

- a. *Shared Governance*, model ini menekankan pada pengambilan keputusan secara bersamaan dan setara oleh semua pihak yang terlibat. Model ini cocok jika tingkat kepercayaan (*trust*) antar aktor tinggi dan tujuan pengelolaan pertambangan selaras.
- b. *Lead Organization Governance*, model ini didominasi oleh satu aktor utama yang memimpin proses pengambilan keputusan. Model ini efektif jika terdapat satu aktor yang memiliki sumber daya dan legitimasi yang kuat untuk memimpin.
- c. *Network Administrative Organization (NAO)*, model ini melibatkan pembentukan badan khusus yang independen untuk mengelola jaringan. Model ini cocok untuk jaringan yang kompleks dengan banyak aktor yang beragam.

Model-model ini akan digunakan untuk menganalisis bentuk pengelolaan pertambangan yang mungkin diadopsi oleh Muhammadiyah. Penelitian ini menganalisis bagaimana potensi peran Muhammadiyah sebagai intermediary sesuai dengan tiga model tata kelola tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontingensi yang relevan seperti tingkat kepercayaan (*trust*), jumlah aktor yang terlibat, konsensus tujuan, dan kebutuhan kompetensi. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan potensi ketegangan dalam tata kelola jaringan sebagaimana diuraikan Provan & Kenis (2008) yaitu: efisiensi vs. inklusivitas, legitimasi internal vs. eksternal, serta fleksibilitas vs. stabilitas. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang holistik tentang potensi peran Muhammadiyah dalam membangun pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

Penulis mengaplikasikan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, dengan Muhammadiyah sebagai fokus penelitian. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi yang ada secara objektif, tanpa adanya intervensi atau manipulasi terhadap data yang dikumpulkan (Arsyam & M. Yusuf Tahir, 2021; Nugrahani & Farida, 2014). Melalui metodologi kualitatif, penelitian ini dapat mengeksplorasi peran Muhammadiyah sebagai aktor intermediary dalam pengelolaan konsesi tambang, kemudian memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam terkait dinamika sosial, interaksi, dan nuansa wacana yang terlibat dalam konteks pertambangan yang akan dikelola.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, termasuk pernyataan resmi dari pimpinan Muhammadiyah, peraturan pemerintah terkait pertambangan, dan pemberitaan media massa yang relevan. Analisis data menggunakan pendekatan gabungan *content analysis* dan *narrative analysis*. Penelitian kualitatif cenderung menitikberatkan perhatian pada aspek-aspek yang tidak dapat diukur dengan kriteria kebenaran yang bersifat absolut, sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menggali data secara mendalam tentang peran Muhammadiyah sebagai aktor intermediary yang menghubungkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pengelolaan tambang. Hal tersebut diharapkan agar kualitas penelitian kualitatif dapat dianalisis secara mendalam dan menghasilkan penelitian yang dapat dijadikan sumber referensi dan kajian terpercaya (Mahanum, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persetujuan Konsesi Pertambangan Muhammadiyah

Regulasi Konsesi Tambang

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), berfungsi sebagai dasar bagi penelitian ini. Regulasi ini menciptakan kesempatan bagi organisasi masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama seperti Muhammadiyah, untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Listiyani & Nopliardy, 2017; Sapii et al., 2024). Hal ini menimbulkan perdebatan publik, mengingat peran ormas yang selama ini lebih difokuskan pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemberian IUPK pada wilayah yang berstatus eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) juga menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dikembalikan ke negara.

Dinamika Internal Muhammadiyah

Keputusan Muhammadiyah menerima tawaran konsesi pertambangan ini didahului oleh dinamika internal yang cukup kompleks. Terdapat perbedaan pandangan di antara kader dan anggota, terutama di kalangan Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) yang lebih menekankan pada aspek lingkungan dan keberlanjutan. Kekhawatiran terhadap dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan dan sosial menjadi alasan utama penolakan dari sebagian kader. Perbedaan ini merefleksikan ketegangan antara prinsip-prinsip keagamaan dan idealisme organisasi dengan tuntutan praktis pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi mendalam dan evaluasi menyeluruh sebelum akhirnya memutuskan menerima konsesi menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk bertindak secara terukur dan bertanggung jawab.

Keputusan Resmi Muhammadiyah

Pernyataan resmi pimpinan Muhammadiyah, terutama pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menjadi kunci pemahaman alasan di balik keputusan ini. Dalam sebuah konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Haedar Nashir menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas (Hakim & Sambas, 2024). Pernyataan ini kemudian diperjelas oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, yang mengungkapkan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses analisis yang mendalam

dari sejumlah ahli di berbagai bidang, termasuk pertambangan, hukum, lingkungan, ekonomi, dan keagamaan, yang menunjukkan bahwa pertimbangan yang diambil adalah matang dan multiperspektif.

Haedar Nashir, yang menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, menyatakan keyakinannya bahwa organisasi yang dipimpinnya akan menerima Izin Usaha Pengelolaan (IUP) untuk tambang dengan mematuhi berbagai prinsip yang konsisten dan mendukung kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan hidup. Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk menjalankan semua operasional pertambangan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, beliau menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan selama proses pengelolaan tambang. Jika nantinya ditemukan berbagai macam situasi atau kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengelolaan secara adil dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial serta lingkungan, Ia menyatakan bahwa Muhammadiyah akan dengan tegas mengembalikan IUP tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Muhammadiyah untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepedulian terhadap lingkungan dalam setiap tindakan yang diambil oleh organisasi (Saptohutomo, 2024).

Keputusan untuk menerima konsesi tambang mencerminkan upaya adaptasi organisasi terhadap dinamika sosial ekonomi yang semakin berkembang. Melalui proses deliberasi yang panjang, Muhammadiyah mengambil langkah untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip moral dan spiritual yang menjadi landasan organisasi. Keputusan ini bukan hanya sekadar respons terhadap peraturan pemerintah, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Dengan menjalin komunikasi yang konstruktif dan menyediakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat, Muhammadiyah berupaya mengedepankan keberlanjutan dan keadilan sosial dalam setiap langkah yang diambil.

B. Analisis Peran Muhammadiyah sebagai Aktor Intermediary

Content Analysis

Analisis konten terhadap dokumen resmi dan pemberitaan media mengidentifikasi beberapa tema kunci yang merefleksikan peran *intermediary* Muhammadiyah. Kata kunci seperti "keadilan," "kesejahteraan," "berkelanjutan," dan "ramah lingkungan" mendominasi. Frekuensi kemunculan kata kunci tersebut

mencerminkan prioritas Muhammadiyah dalam pengelolaan pertambangan. Pernyataan mengenai komitmen untuk melibatkan lembaga lingkungan hidup dan menyesuaikan standar yang tinggi menunjukkan upaya Muhammadiyah untuk mewujudkan prinsip "ramah lingkungan". Analisis ini mengungkapkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya memberikan perhatian pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan dalam segala aktivitasnya.

Narrative Analysis

Analisis naratif mengungkapkan proses pengambilan keputusan yang kompleks dan bertahap di internal Muhammadiyah. Narasi yang dibangun menunjukkan adanya perdebatan dan pertimbangan yang beragam, termasuk kekhawatiran atas potensi dampak negatif pertambangan. Namun, narasi akhirnya bergeser menuju komitmen untuk mendorong praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan memastikan kepentingan masyarakat. Pernyataan resmi pimpinan Muhammadiyah yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menunjukkan upaya untuk membangun kepercayaan publik. Proses ini menunjukkan dinamika internal yang kompleks dalam menghadapi tantangan baru ini.

Peran Muhammadiyah sebagai Aktor Intermediary berdasarkan Kerangka Howells (2006).

Berdasarkan temuan, Muhammadiyah menjalankan fungsi-fungsi *intermediary* sebagaimana dijelaskan Howells (2006):

- a. Pengumpulan Informasi: Muhammadiyah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (pemerintah, perusahaan, masyarakat) untuk memahami permasalahan dan kebutuhan.
- b. Fasilitasi Dialog dan Negosiasi: Muhammadiyah memfasilitasi dialog dan negosiasi antar pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- c. Penyelesaian Konflik (Potensial): Meskipun belum terjadi konflik nyata, persiapan yang matang mengindikasikan upaya antisipatif Muhammadiyah untuk mencegah dan menyelesaikan potensi konflik di masa mendatang.
- d. Pengembangan Kapasitas: Kerjasama dengan berbagai pihak (universitas, lembaga lingkungan hidup, perusahaan berpengalaman) menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan terkait pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

C. Model Tata Kelola Jaringan dan Ketegangan yang Muncul

Relevansi Model Tata Kelola Jaringan Provan & Kenis (2008)

Berdasarkan temuan, model *lead organization governance* yang dikembangkan oleh (Provan & Kenis, 2008) menunjukkan relevansi yang sangat kuat dalam menggambarkan peran Muhammadiyah dalam konteks pengelolaan konsesi pertambangan. Keputusan yang diambil oleh Muhammadiyah untuk menerima konsesi, beserta rencana pengelolaan tambang yang ditetapkan secara terstruktur, mencerminkan adanya kepemimpinan yang jelas dan terpusat. Namun, selain aspek kepemimpinan yang terpusat, terlihat pula bahwa Muhammadiyah berusaha melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga mencerminkan elemen *shared governance*, yang mengindikasikan partisipasi dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, kompleksitas peran Muhammadiyah sebagai aktor *intermediary* terlihat jelas, di mana ia tidak sepenuhnya mengikuti salah satu model ideal yang ada, melainkan mengintegrasikan berbagai elemen dalam tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap konteks yang lebih luas.

Ketegangan Efisiensi vs. Inklusivitas

Persiapan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dalam pengelolaan tambang menunjukkan pendekatan yang matang dan terstruktur, yang merupakan langkah strategis untuk memastikan efisiensi operasional. Namun, di sisi lain, terdapat upaya yang sengaja dilakukan untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, universitas, dan lembaga lingkungan hidup. Upaya ini mencerminkan niat serius Muhammadiyah untuk menyeimbangkan efisiensi dengan inklusivitas. Ketegangan ini merefleksikan suatu dilema yang umum dalam tata kelola, di mana efisiensi operasional sering kali bertentangan dengan kebutuhan untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Dengan upaya untuk mengintegrasikan kedua elemen ini, Muhammadiyah berusaha menciptakan sebuah model pengelolaan yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi komunitas yang lebih luas.

Ketegangan Legitimasi Internal vs. Eksternal

Pengelolaan konsesi tambang yang dilakukan Muhammadiyah dapat dipahami sebagai upaya strategis membangun legitimasi secara menyeluruh, baik secara internal maupun eksternal. Legitimasi internal dibangun melalui proses diskusi dan konsolidasi di dalam organisasi, sehingga setiap anggota Muhammadiyah merasa memiliki andil dan

tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang diambil. Di sisi lain, legitimasi eksternal dicapai melalui prakarsa transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama dengan berbagai pihak luar. Proses ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat menyadari pentingnya membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan eksternal, termasuk masyarakat lokal dan lembaga terkait. Dengan demikian, upaya untuk menyeimbangkan legitimasi internal dan eksternal ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk tidak hanya memenuhi ekspektasi internal tetapi juga menjawab harapan dan tuntutan dari pihak luar, sehingga menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan pengelolaan tambang.

Ketegangan Fleksibilitas vs. Stabilitas

Muhammadiyah menunjukkan langkah yang strategis dalam perencanaan pengelolaan tambang dengan pendekatan yang teliti dan matang, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam setiap aspek pengelolaan. Perencanaan ini ditekankan untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan risiko yang mungkin muncul. Namun, di sisi lain, fleksibilitas juga merupakan bagian penting dari pendekatan ini. Muhammadiyah menyadari bahwa kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat, sehingga penting untuk memiliki rencana yang dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, Muhammadiyah mampu menyesuaikan strategi pengelolaan agar tetap relevan dan responsif. Ketegangan ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan dua hal yang sering kali dianggap bertentangan, yaitu stabilitas yang diperlukan untuk keberlangsungan pengelolaan yang efektif dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang senantiasa berubah dalam konteks pertambangan.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan kompleksitas dan dinamika peran Muhammadiyah sebagai aktor intermediary dalam pengelolaan konsesi pertambangan. Meskipun organisasi ini masih berada dalam tahap persiapan, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen untuk menjalankan fungsi intermediary dengan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa model *lead organization governance* adalah yang paling relevan untuk menggambarkan peran ini, namun dengan penekanan pada elemen *shared governance* yang memberikan ruang bagi partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Upaya Muhammadiyah dalam menyeimbangkan berbagai ketegangan dalam tata kelola jaringan menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Ketegangan antara efisiensi dan inklusivitas menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak

hanya fokus pada hasil yang cepat dan efektif tetapi juga mengutamakan partisipasi masyarakat. Selain itu, ketegangan antara legitimasi internal dan eksternal mengindikasikan kesadaran Muhammadiyah untuk membangun kepercayaan dari dalam organisasi dan di luar komunitasnya.

Di sisi lain, upaya untuk menyeimbangkan fleksibilitas dan stabilitas dalam pengelolaan pertambangan juga sangat penting. Kesiapan Muhammadiyah untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan memperkuat posisi mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keseluruhan temuan ini memberi gambaran bahwa Muhammadiyah berkomitmen bukan hanya untuk bermain dalam ranah ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, dengan tujuan akhir mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih luas tentang peran organisasi keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam yang etis dan bertanggung jawab. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memantau implementasi pengelolaan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penting juga untuk meneliti lebih lanjut bagaimana Muhammadiyah dapat secara efektif mengatasi potensi konflik dan tantangan dalam proses pengelolaan tambang, serta bagaimana model pengelolaan yang diusung dapat menjadi model yang dapat direplikasi di tempat lain. Kajian komparatif dengan model pengelolaan tambang oleh ormas lain juga dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyam, M., & M. Yusuf Tahir. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>
- Fariduddin, A. M., & Kusuma, O. A. (2024). Menyibak Ilusi Ideologi dalam Pemberian Izin Pertambangan bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan sebagai Upaya Pembangunan Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 93–106.
- Hakim, L., & Sambas. (2024). PP Muhammadiyah putuskan terima konsesi tambang dari pemerintah. *Antara* (Kantor Berita Indonesia). <https://www.antaraneews.com/berita/4222099/pp-muhammadiyah-putuskan-terima-konsesi-tambang-dari-pemerintah>
- Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. *Research Policy*, 35(6), 715–728. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.03.005>

- Listiyani, N., & Nopliardy, R. (2017). Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 67–86.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Nugrahani, & Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).
- Priyono, D. P., & Nilamsari, W. (2021). Penyalahgunaan Hak dan Wewenang Organisasi Masyarakat di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 253–269.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance : Structure , Management , and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Sapii, R. B. S., Abidin, F. R. M., & Puspitasari, S. A. (2024). Ambiguitas Pengaturan Penawaran Wiupk Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. *urnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1).
- Saptohutomo, A. P. (2024). Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang Dianggap Membingungkan. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/29/20503101/keputusan-muhammadiyah-terima-izin-tambang-dianggap-membingungkan>